



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 April 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG DEPOSIT DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TRI WAHYU HARI MURTININGSIH
2. Jabatan : KASI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN
3. NHK : 249646

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/600 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1145 m2/700 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 5500 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 320 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 224.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 30.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	5.354.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.354.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.